



LAPORAN KINERJA

**BPPMHKP SURABAYA II
TAHUNAN
TA 2024**

BPPMHKP SURABAYA II
JALAN KALIMAS BARU NO 86.TANJUNG PERAK - SURABAYA

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya II (LKj) Tahunan TA. 2024 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Balai KIPM Surabaya II dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Di dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Landasan penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi BKIPM Tahun 2024. Secara umum, pada tahun 2024 seluruh target indikator kinerja yang ditetapkan telah dicapai sesuai target yang ditetapkan.

Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja Balai KIPM Surabaya II di masa mendatang. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Surabaya, 17 Januari 2025

Kepala Balai KIPM Surabaya II,



Ricat Pahlefi H, S.St.Pi, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BEALAKANG	1
1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
1.3 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA	3
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA	
2.1 CAPAIAN KINERJA	5
2.2 ANALISIS DAN EVALUASI	7
2.3 REALISASI ANGGARAN	19
BAB III PENUTUP	
3.1 KESIMPULAN	20
3.2 REKOMENDASI	20

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BKIPM Tahun 2024	4
Tabel 2.1 Capaian Kinerja BKIPM Tahun 2024.....	6
Tabel 2.2 Target dan Realisasi IK1 pada Tahun 2024.....	7
Tabel 2.3 Target dan Realisasi IK2 pada Tahun 2024.....	9
Tabel 2.4 Target dan Realisasi IK3 pada Tahun 2024.....	9
Tabel 2.5 Target dan Realisasi IK4 pada Tahun 2024.....	10
Tabel 2.6 Target dan Realisasi IK5 pada Tahun 2024.....	11
Tabel 2.7 Target dan Realisasi IK6 pada Tahun 2024.....	13
Tabel 2.8 Target dan Realisasi IK7 pada Tahun 2024.....	13
Tabel 2.9 Target dan Realisasi IK8 pada Tahun 2024.....	14
Tabel 2.10 Target dan Realisasi IK9 pada Tahun 2024	15
Tabel 2.11 Target dan Realisasi IK10 pada Tahun 2024	16
Tabel 2.12 Target dan Realisasi IK11 pada Tahun 2024	16
Tabel 2.13 Target dan Realisasi IK12 pada Tahun 2024	17
Tabel 2.14 Target dan Realisasi IK13 pada Tahun 2024	17
Tabel 2.15 Target dan Realisasi IK14 pada Tahun 2024	18
Tabel 2.17 Penyerapan Anggaran per Kegiatan Tahun 2024	19
Tabel 2.18 Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2024	19

RINGKASAN EKSEKUTIF

Nilai capaian kinerja Balai KIPM Surabaya II pada Tahun. 2024 adalah sebesar 114,53 %. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai KIPM Surabaya II yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut :

1. Seluruh target IKU yang ditetapkan telah dicapai sesuai target yang ditetapkan
2. Uraian 14 IKU yang capaiannya memenuhi dan/atau melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu:
 - a. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
 - b. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
 - c. Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI
 - d. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor
 - e. Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi
 - f. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Balai KIPM Surabaya II
 - g. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Surabaya II
 - h. Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Surabaya II
 - i. Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Surabaya II
 - j. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai KIPM Surabaya II
 - k. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) UPT BKIPM Surabaya II
 - l. Nilai Perencanaan Kinerja Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Surabaya II
 - m. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup UPT Balai KIPM Surabaya II
 - n. Tingkat kepatuhan BMN lingkup UPT Balai KIPM Surabaya II

Kinerja keuangan Balai KIPM Surabaya II tahun 2024 melalui program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dengan pagu alokasi anggaran sebesar Rp 13.055.493.000,-. Realisasi penyerapan anggaran Balai KIPM Surabaya II tahun 2024 mencapai Rp 12.941.636.472,- atau sebesar 99,13 %.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai KIPM Surabaya II merupakan salah satu UPT BKIPM - Kementerian Kelautan dan Perikanan. BKIPM mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BKIPM dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu asas penyelenggaraan good governance adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai KIPM Surabaya II dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2024 untuk mencapai visi dan misi Balai KIPM Surabaya II. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja di lingkungan Balai KIPM Surabaya II serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholder* demi perbaikan kinerja Balai KIPM Surabaya II. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas. Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, BKIPM mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, sertakeamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugasnya, BKIPM menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- pelaksanaan perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- pelaksanaan administrasi Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BKIPM, Kepala Balai KIPM Surabaya II dibantu oleh 4 Tim Kerja yaitu Tim Kerja Pengendalian Mutu, Tim Kerja Pengawasan Mutu, Tim Kerja Standarisasi Sistem dan Tim Kerja Dukungan Manajerial dan Data Informasi serta kelompok Jabatan Fungsional.

Jumlah SDM aparatur yang mendukung Balai KIPM Surabaya II sejumlah 42 pegawai yang terdiri dari 2 pegawai pejabat struktural, 15 pegawai fungsional umum termasuk didalamnya fungsional pranata komputer, fungsional pranata keuangan APBN dan fungsional Arsiparis, dan 25 pegawai fungsional pengawas mutu. Distribusi pegawai yang berimbang ini diperlukan dalam membentuk workforce yang efektif dan efisien.

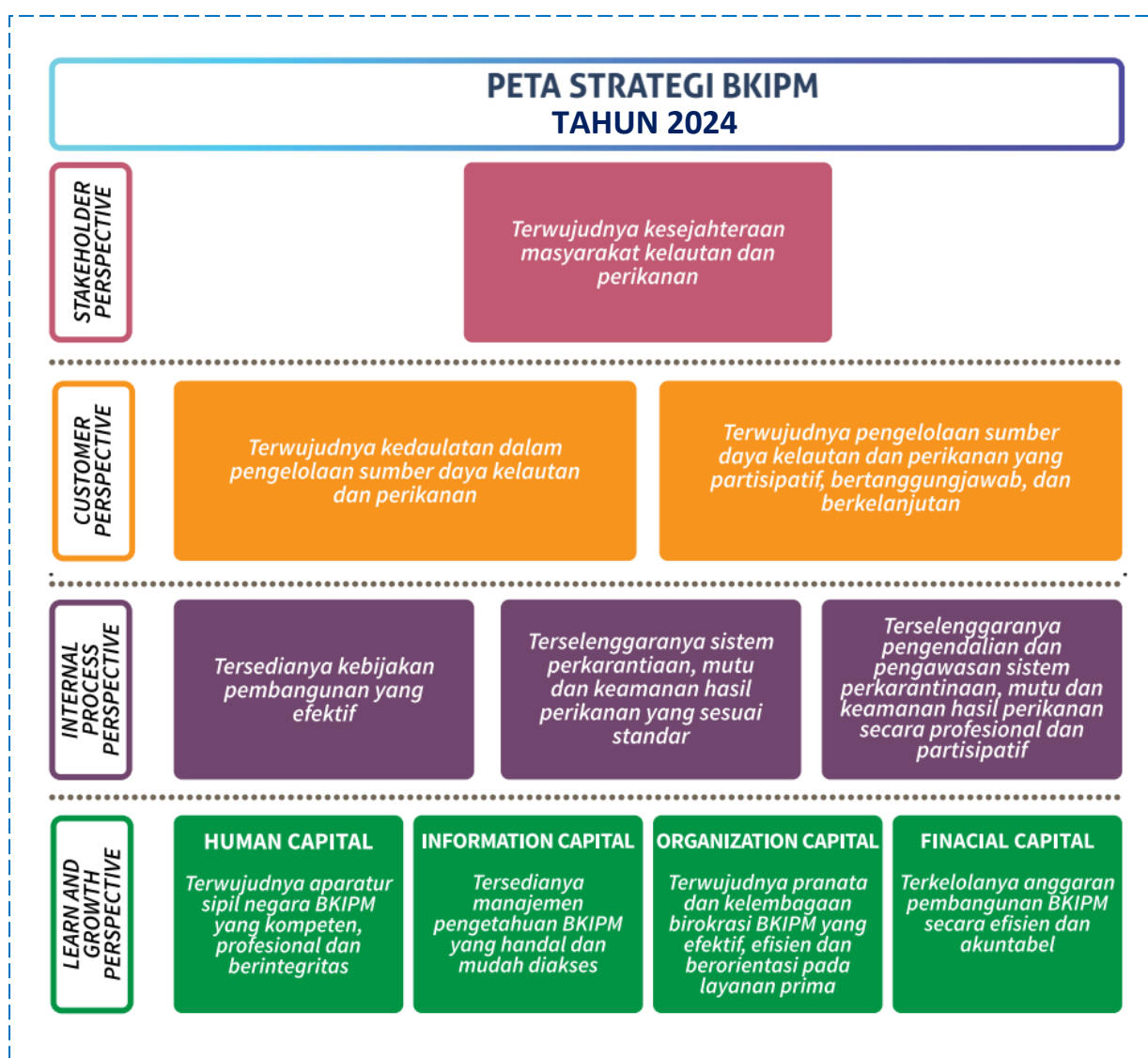
Struktur organisasi Balai KIPM Surabaya II dapat dilihat dalam Gambar 1.1.



1.3 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Peta strategi, sasaran dan indikator kinerja Balai KIPM Surabaya II tahun 2024 ditunjukkan pada Gambar 1.2 dan Tabel 1.1 di bawah ini.



Tabel 1.1
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai KIPM Surabaya II Tahun 2024

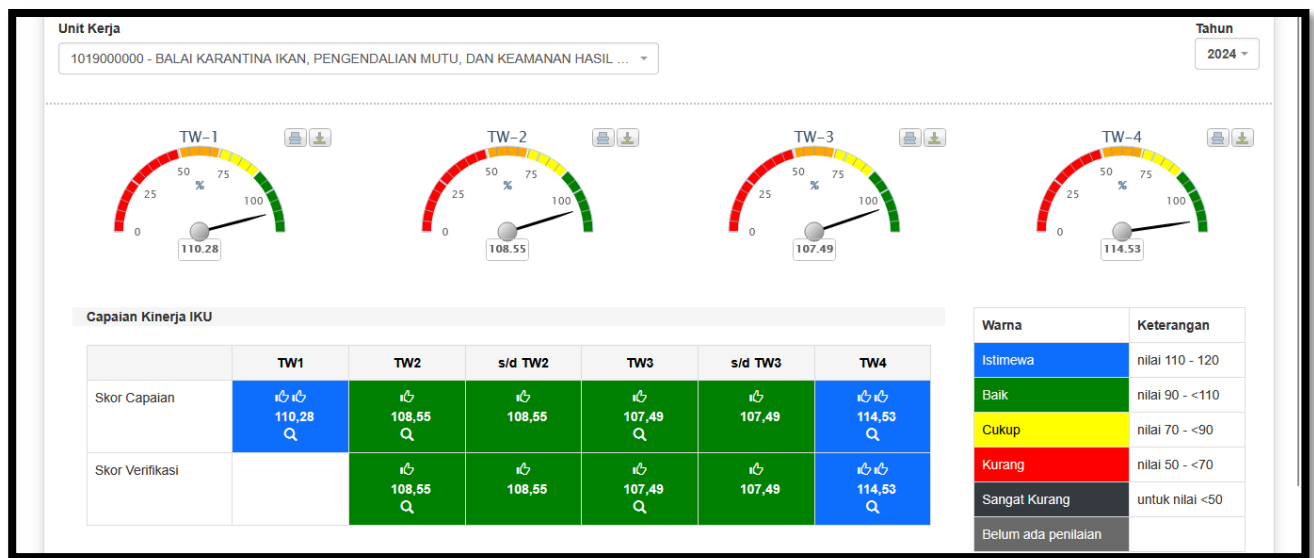
SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
				2023	2024
1	Terselenggaranya Pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Surabaya II (%)	-	70
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Surabaya II (%)	-	70
		3	Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Balai KIPM Surabaya II (%)	5 lokasi	70
		4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Surabaya II (%)	98	99
2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5	Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Surabaya II (%)	-	70
		6	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Balai KIPM Surabaya II (Nilai indeks)	84	3,36
3	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan BPPMHKP	7	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Surabaya II (Nilai indeks)	84	86
		8	Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Surabaya II (Nilai)	-	82
		9	Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Surabaya II (%)	100	100
		10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai KIPM Surabaya II (%)	75	80
		11	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT BKIPM Surabaya II (Nilai)	93,75	93,76
		12	Nilai Perencanaan Kinerja Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Surabaya II (Nilai)	82	71
		13	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup UPT Balai KIPM Surabaya II (%)	77,5	80
		14	Tingkat kepatuhan BMN lingkup UPT Balai KIPM Surabaya II (%)	77,5	80

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1 CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Balai KIPM Surabaya II Tahun 2024 mendapat predikat Istimewa, hal ini ditandai dengan Nilai Capaian Kinerja sebesar 114,53 %, berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja di www.kinerjaku.kkp.go.id.



Daftar Capaian Unit Kerja				
Tahun	Level-1	Level-2	Level-3	
2024	Belum di pilih...	Belum di pilih	Belum di pilih	Download Tutup
TW-1	TW-2	TW-3	TW-4	
1019000000 - BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SURABAYA II				
110.28% ✎ 📊 📄	108.55% ✎ 📊 📄	107.49% ✎ 📊 📄	114.53% ✎ 📊 📄	

Gambar 2.1 Dashboard capaian IKU pada sistem aplikasi pengelolaan kinerja

Rekapitulasi capaian kinerja Balai KIPM Surabaya II pada Tahun Anggaran 2024 secara keseluruhan, dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Balai KIPM Surabaya II Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		CAPAIN	
				TARGET	REALISASI
1	Terselenggaranya Pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Surabaya II (%)	70	100
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Surabaya II (%)	70	100
		3	Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Balai KIPM Surabaya II (%)	70	100
		4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Surabaya II (%)	99	99,40
2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5	Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Surabaya II (%)	70	83,10
		6	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Balai KIPM Surabaya II (Nilai indeks)	3,36	3,82
3	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan BPPMHKP	7	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Surabaya II (Nilai indeks)	86	90,64
		8	Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Surabaya II (Nilai)	82	83,10
		9	Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Surabaya II (%)	100	100
		10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai KIPM Surabaya II (%)	80	100
		11	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT BKIPM Surabaya II (Nilai)	93,76	93,58
		12	Nilai Perencanaan Kinerja Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Surabaya II (Nilai)	71	92,50
		13	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup UPT Balai KIPM Surabaya II (%)	80	84,34
		14	Tingkat kepatuhan BMN lingkup UPT Balai KIPM Surabaya II (%)	80	97,50

2.2 ANALISIS DAN EVALUASI

Sasaran Strategis 1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan diperoleh dari pencapaian indikator ; (1). Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan, (2). Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan, (3). Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI dan (4). Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor.

IK1. Presentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB,CPIB,CPPIB,CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada: (1). Standar Nasional Indonesia (SNI) dan (2). Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku. Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual.

Pada Triwulan IV tahun 2024, untuk IK 1 yaitu Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai KIPM Surabaya II di targetkan sebesar 70 %. Untuk IKU 1 ini sudah dilakukan Inspeksi

sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) pada Pelaku Usaha Ersal Syahreza (komoditi ikan Lele) di Kabupaten Lamongan dan PPI Lamongan (komoditi udang). Selain itu, juga dilakukan Inspeksi sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas kapal (CPIB) Kapal di Ujung Pangkah – Gresik.

Realisasi persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai KIPM Surabaya II tahun 2024 mencapai 100% sertifikat atau 120% dari target tahunan yang ditetapkan sebesar 70%.

Tabel 2.2
Target dan Realisasi IK1 pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2024			Renstra 2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Target	%
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	-	-	-	-	-	70	100	120	70	100

IK2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada: (1). Standar Nasional Indonesia (SNI); (2). Standar Internasional (Codex Alimentarius); (3).

Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku. Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

Realisasi capaian indikator Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup UPT Balai KIPM Surabaya II pada Triwulan II Tahun 2024 mencapai 6 lokasi atau 100% dari target triwulan II yang ditetapkan sebesar 6 atau 100% dari target tahunan yang ditetapkan sebanyak 6 lokasi.

Tabel 2.3
Target dan Realisasi IK2 pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2024			Renstra 2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Target	%
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	-	-	-	-	-	70	100	120	70	100

IK3. Persentase Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Di Wilayah RI

Sikap yang selektif dan kritis dari pelanggan dalam memilih produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka, menjadikan perusahaan dituntut untuk selalu menghasilkan produk-produk yang bermutu agar tidak ditinggalkan oleh pelanggannya. Hal ini kemudian menghadapkan perusahaan pada persoalan lain yaitu upaya menjaga dan meningkatkan mutu produk yang dihasilkan, namun tetap dengan biaya yang dapat diterima (fleksibel). Di industri perikanan pengendalian mutu mutlak dilakukan karena produk perikanan cepat mengalami kemunduran mutu. Pengendalian mutu tersebut meliputi pengawasan setiap kegiatan industri perikanan agar memenuhi persyaratan teknis, higienitas dan pemasaran dengan tujuan agar produk yang dihasilkan dapat diterima oleh konsumen dalam batas-batas standar yang telah ditetapkan.

Pemeliharaan dan pengendalian mutu merupakan faktor penting bagi suatu perusahaan untuk menjaga konsistensi mutu produk yang dihasilkan, sesuai dengan tuntutan pasar, sehingga perlu dilakukan manajemen pemeliharaan dan pengendalian mutu untuk semua proses produksi. Pemeliharaan dan pengendalian mutu harus dilakukan sejak awal proses produksi sampai saluran distribusi untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, meningkatkan jaminan keamanan produk, mencegah banyaknya produk yang rusak dan mencegah pemborosan biaya akibat kerugian yang ditimbulkan.

Metode pengukuran mutu ikan merupakan salah satu cara untuk mengetahui tingkat suatu mutu dari ikan tersebut. Pengukuran mutu ikan dapat dibagi menjadi 3 yaitu secara kimiawi, fisik dan mikrobiologi (Amir dan Putra, 2014). Hal ini sangat penting bagi suatu perusahaan agar mengetahui mutu dari bahan baku yang akan masuk ke pabrik karena jika bahan baku yang masuk tersebut jelek maka akan mempengaruhi dari produk akhir yang dihasilkan.

Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) merupakan alat untuk memperkirakan potensi bahaya dan menentukan sistem pengendalian yang berfokus pada pencegahan terjadinya bahaya dan bukannya sistem yang semata-mata bergantung pada pengujian produk akhir (Hermawan, 2005). HACCP mencakup 2 aspek kegiatan yakni Good Manufacturing Practices (GMP) dan Sanitation Standard Operating Procedure (SSOP) sebagai standar dalam penerapan sistem pengendalian mutu terpadu HACCP sangat diperlukan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi sehingga tidak mendatangkan kerugian pada pihak konsumen dan produsen.

Realisasi capaian indikator Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Balai KIPM Surabaya II pada Tahun 2024 mencapai 100 persen atau 120 persen dari target tahunan yang ditetapkan sebesar 70 persen.

Tabel 2.4
Target dan Realisasi IK3 pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2024			Renstra 2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Target	%
Pengawasan mutu hasil perikanan domestik	1	2	7	5	5	70	100	120	70	100

IK4. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor).

Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional.

Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan Bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

Realisasi pada IKU Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor Balai KIPM Surabaya II tahun 2024 sebesar 99,40 persen dari target tahunan yang ditetapkan sebesar 99 persen.

Tabel 2.5
Target dan Realisasi IK4 pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2024			Renstra 2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Target	%
Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor	-	-	-	-	-	99	99,40	100,40	99	99,40

Sasaran Strategis 2. Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar diperoleh dari pencapaian indikator ; Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga Inspeksi

IK5. Nilai Pemenuhan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 dan ISO/IEC 17020 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan Tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.

ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal

(akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri

Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji (ISO 17025) di laboratorium *official control* yang dinilai melingkupi:

1. Ruang Lingkup
2. Acuan Normatif
3. Persyaratan Umum
4. Persyaratan Struktural
5. Persyaratan Sumber Daya
6. Persyaratan Proses
7. Persyaratan Sistem Manajemen

ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020) yang dinilai melingkupi:

1. Persyaratan Umum
2. Persyaratan Struktural
3. Persyaratan Sumberdaya
4. Persyaratan Proses
5. Persyaratan Sistem Manajemen

Realisasi pada IKU Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga Inspeksi Balai KIPM Surabaya II tahun 2024 sebesar 83,10 persen dari target tahunan yang ditetapkan sebesar 70 persen.

Tabel 2.6
Target dan Realisasi IK5 pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2024			Renstra 2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Target	%
Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga Inspeksi	-	-	-	-	-	70	83,10	118,71	70	83,10

Sasaran Strategis 3. Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Balai KIPM Surabaya II

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Balai KIPM Surabaya II diperoleh dari pencapaian indikator; Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Balai KIPM Surabaya II, Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Surabaya II, Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Surabaya II, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Surabaya II, Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Surabaya II, Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Surabaya II, Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai KIPM Surabaya II, Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup UPT Balai KIPM Surabaya II dan Tingkat kepatuhan BMN lingkup UPT Balai KIPM Surabaya II.

IK6. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Balai KIPM Surabaya II

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di lingkup Balai KIPM Surabaya II menggunakan elektronik SKM (esurvey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat:<http://ok.bkipm.kkp.go.id/skm/> Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat diakses oleh seluruh pengguna jasa Balai KIPM Surabaya II.

Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner.

Indikator Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Surabaya II dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

Bobot Nilai rata-rata tertimbang = $\frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,1111$

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

IKM = $\frac{\text{Total nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Bobot penimbang}$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

IKM unit pelayanan x 25

Realisasi pada IKU Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Balai KIPM Surabaya II tahun 2024 sebesar 3,82 indeks dari target tahunan yang ditetapkan sebesar 3,36 indeks.

Tabel 2.7
Target dan Realisasi IK6 pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2024			Renstra 2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Target	%
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Balai KIPM Surabaya II	-	-	-	95,98	95,23	3,36	3,82	113,69	3,36	3,82

IK7. Indeks profesionalitas ASN pada UPT Balai KIPM Surabaya II

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas- tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (PermenPAN dan RB No.38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Formula menghitung capaian indikator indeks profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi : kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. Realisasi indikator Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2024 mencapai nilai 90.64 atau 105.40% dari target tahunan 86.

Tabel 2.8
Target dan Realisasi IK7 pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2024			Renstra 2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Target	%
Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Surabaya II	-	76,88	84,68	84,29	90,47	86	90,64	105,40	86	105,40

IK8. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Balai KIPM Surabaya II

Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup Balai KIPM Surabaya II dalam rangka peningkatan kualitas evaluasi akuntabilitas agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit kerja yang dievaluasi dan memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindak lanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik (feedback) perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja, dan peningkatan capaian kinerja unit kerja secara berkelanjutan.

Inspektorat Jenderal terus meningkatkan kuantitas jumlah unit kerja yang menjadi objek evaluasi SAKIP (Self Assestement) setiap tahunnya namun belum dapat optimal karena memiliki keterbatasan anggaran dan SDM.

Hasil evaluasi/Rekonsiliasi Kinerja yang dilakukan Biro Perencanaan (Rapid Assestement) akan melengkapi keterbatasan yang dimiliki Inspektorat Jenderal dengan harapan KKP memiliki gambaran kualitas implementasi SAKIP secara menyeluruh di seluruh Unit Kerja.

Penilaian indikator nilai rekonsiliasi kinerja Balai KIPM Surabaya II dilakukan dan dilaksanakan secara mandiri dengan menggunakan Kertas Kerja yang terdapat pada aplikasi kinerjaku untuk menilai aspek kepatuhan (bobot 30%), kesesuaian (bobot 30%) dan ketercapaian (bobot 40%). Realisasi indikator ini pada tahun 2024 mencapai nilai 83.10 atau 101.34% dari target tahunan 82.

Tabel 2.9
Target dan Realisasi IK8 pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2024			Renstra 2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Target	%
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP satker Balai KIPM Surabaya II	-	-	-	-	-	82	83,10	101,34	82	101,34

IK9. Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Balai KIPM Surabaya II

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKBKIPM merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Indikator persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai KIPM Surabaya II memiliki target 100 persen dan dihitung dengan metode tahunan. Cara menghitung nilai indikator tersebut adalah 100 persen ketika tidak ada temuan.

Persentase temuan BPK lingkup Balai KIPM Surabaya II pada tahun 2024 sebesar 100 %.

Tabel 2.10
Target dan Realisasi IK9 pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2024			Renstra 2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Target	%
Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai KIPM Surabaya II	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100

IK10. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT Balai KIPM Surabaya II

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk Surat maupun Bab). Pada periode Triwulan I tahun 2024 tidak terdapat rekomendasi dari Inspektorat Jenderal Kepada Balai KIPM Surabaya II, karna periode tersebut belum adanya pengawasan dari Inspektorat Jenderal. Sehingga Balai KIPM Surabaya II pada triwulan I tahun 2024 status *Tuntas*.

Capaian pada indikator persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT Balai KIPM Surabaya II sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 mencapai 100% atau (120 %) dari target triwulan II tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 80%.

Tabel 2.11
Target dan Realisasi IK10 pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2024			Renstra 2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Target	%
Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja	-	-	100	100	100	80	100	120	80	120

IK11. Nilai IKPA UPT Balai KIPM Surabaya II

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran ini merupakan sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran. pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu pengelolaan uang persediaan, data kontrak, kesalahan SPM, retur SP2D, halaman III DIPA, revisi DIPA, penyelesaian tagihan, rekon LPJ, renkas, realisasi, pagu minus dan dispensasi SPM.

Target yang ditetapkan pada indikator nilai IKPA pada Balai KIPM Surabaya II tahun 2024 adalah 93,76 sedangkan capaian indikator ini pada tahun 2024 mencapai nilai 93,58 atau 99,81% dari target tahunan 93,76. Hal ini disebabkan keterlambatan mengajukan revisi Halaman III DIPA tingkat Kanwil, karna adanya revisi tingkat Pusat (Eselon I).

Tabel 2.12
Target dan Realisasi IK11 pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2024			Renstra 2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Target	%
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Balai KIPM Surabaya II	-	92,28	92,34	95,26	95,22	93,76	93,58	99,81	93,76	99,81

IK12. Nilai Kinerja Anggaran UPT Balai KIPM Surabaya II

Nilai kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Data berasal dari sistem aplikasi SMART Kemenkeu dan menggunakan rumus perhitungan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011.

Target yang ditetapkan pada indikator nilai kinerja anggaran Balai KIPM Surabaya II tahun 2024 adalah 71 sedangkan capaian indikator ini pada tahun 2024 sebesar 92,50.

Tabel 2.13
Target dan Realisasi IK12 pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2024			Renstra 2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Target	%
Nilai Kinerja Anggaran lingkup Balai KIPM Surabaya II	92,78	-	87,33	86,04	95,22	71	92,50	120	71	120

IK13. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa pada UPT Balai KIPM Surabaya II

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Balai KIPM Surabaya II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan PBJ diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut : Rencana umum pengadaan telah diupload kedalam aplikasi SIRUP (20%), Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%), Laporan penyelenggaraan PBJ (20%) dan Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%)

Target Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa UPT Balai KIPM Surabaya II tahun 2024 adalah 80 persen dan capaian pada indikator tingkat kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa UPT Balai KIPM Surabaya II Tahun 2024 sebesar 84,34

Tabel 2.14
Target dan Realisasi IK13 pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2024			Renstra 2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Target	%
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Balai KIPM Surabaya II	-	-	-	79,56	78,26	80	84,34	105,43	80	105,43

IK14. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN pada UPT Balai KIPM Surabaya II

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Balai KIPM Surabaya II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut : Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) tahun 2024 (10%), Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan I tahun 2024 baik ke Pengguna Barang dan Pengelola Anggaran (25%), Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi asset) tahun 2019-2023 (20%), Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2024 didukung berita acara serah terima

(BAST)/berita acara pemakaian (25%) dan Penyusunan laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (20%).

Target Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN UPT Balai KIPM Surabaya II tahun 2024 adalah 80 persen dan capaian pada indikator tingkat kepatuhan Pengelolaan BMN UPT Balai KIPM Surabaya II pada Triwulan II Tahun 2024 belum dapat diukur karna periode pengukurannya dilaksanakan tahunan.

Tabel 2.15
Target dan Realisasi IK14 pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2024			Renstra 2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Target	%
Tingkat Kepatuhan Barang Milik Negara lingkup Balai KIPM Surabaya II	-	-	-	97,50	98,76	80	97,50	120	80	120

2.3 REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Balai KIPM Surabaya II pada tahun anggaran (T.A) 2024 sebesar Rp 13.055.493.000,- Anggaran ini terdiri dari rupiah murni sebesar Rp 10.758.166.000,- dan PNPB sebesar Rp 2.297.327.000,-. Realisasi penyerapan anggaran tahun 2024 mencapai Rp 12.941.636.472,- atau sebesar 99,13 %. Realisasi penyerapan anggaran Balai KIPM Surabaya II berdasarkan jenis kegiatan dan jenis belanja disajikan pada Tabel 2.17 dan Tabel 2.18.

Tabel 2.17
Penyerapan Anggaran per Kegiatan TA. 2024

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi TW II	%
1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM	11.488.345.000,-	11.439.272.989,-	99,57
2	Pengendalian Mutu	582.000.000,-	539.933.283,-	92,77
3	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	985.148.000,-	962.430.200,-	97,69
TOTAL		13.055.493.000,-	12.941.636.472,-	99,13

Tabel 2.18
Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja TA. 2024

	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi TW II	%
1	Belanja Pegawai	6.858.750.000,-	6.830.988.882,-	99,60
2	Belanja Barang	6.196.743.000,-	6.110.647.590,-	98,61
3	Belanja Modal	0,-	0,-	0,00
TOTAL		13.055.493.000,-	12.941.636.472,-	99,13

BAB III

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

1. Laporan Kinerja (LKj) Balai KIPM Surabaya II Tahun 2024 menyajikan keberhasilan capaian sasaran strategis BKIPM pada tahun anggaran 2024, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan perbandingan terhadap capaian 5 (lima) tahunan sebelumnya sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam perencanaan program dan kegiatan selama satu tahun.
2. Secara umum, capaian sasaran strategis dan IKU Balai KIPM Surabaya II yang diperjanjikan telah tercapai sesuai rencana dan target yang ditetapkan, dapat disimpulkan bahwa secara umum nilai rata-rata pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 114,53% (kategori Istimewa)

3.2 REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja BKIPM pada Tahun 2024, sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

1. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik (bulanan dan triwulanan) berdasarkan rencana aksi yang telah disusun untuk mengawal pencapaian kinerja;
2. Apabila ada juknis/juklak baru terkait operasional kegiatan agar disampaikan kepada tim laporan kinerja agar dibuatkan justifikasi pada laporan apabila realisasi IKU tidak sesuai target yang ditetapkan.